



# MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG MENSEJAHTERAKAN *di Indonesia*

## Topik :

Demokrasi dan Tatakelola Pemerintahan

Demokrasi, Kearifan Lokal dan Pengembangan Sumberdaya Perdesaan

Demokrasi dan Pemenuhan Hak Ekosob

Demokrasi, Media dan Jejaring Sosial

Demokrasi, Sastra dan Linguistik

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**  
dalam rangka Dies Natalis FISIP UNSOED XXVI

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan  
Mewujudkan Demokrasi yang Mensejahterakan di Indonesia

© UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed

Cetakan Pertama, Tahun 2011  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
All Right Reserved

- Editor : 1. Dr. Ali Rokhman, M.Si.  
(MAP Universitas Jenderal Soedirman)  
2. Dr. Masrukin, M.Si.  
(FISIP Universitas Jenderal Soedirman)  
3. Dr. Irwansyah, M.A.  
(FISIP Universitas Indonesia)
- Layouter : Tunjung Linggarwati, Ahmad Sabiq  
Perancang Sampul : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed  
Penata Letak : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed  
Pracetak dan Produksi : Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed

Penerbit



UPT. PERCETAKAN DAN PENERBITAN  
Universitas Jenderal Soedirman  
Kampus UNSOED Grendeng  
Jl. Prof. dr. HR. Bunyamin No. 708, Purwokerto 53122  
Telp. (0281) 635292 Pes. 227  
e-Mail: unsoedpress@yahoo.com

ISBN: 978-979-9204-51-6  
xi + 500 hal, 15,5 x 23 cm

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Asean Community : Sebuah Upaya Bersama Mewujudkan Demokrasi dan Kesejahteraan .....	113
<i>Tunjung Linggarwati</i>	
Peran <i>Epistemic Community</i> sebagai Jaringan <i>Knowledge-based Expert</i> dalam Penanganan Krisis Ekonomi dan <i>Exit Strategy</i> Indonesia Pasca Kerjasama Lembaga Keuangan Internasional (IMF) .....	130
<i>Renny Miryanti</i>	
Peran Pesantren dalam Proses Demokrasi di Indonesia .....	141
<i>Elis Puspitasari</i>	
Peran Ulama dalam Mencegah Radikalisme Umat di Desa Jatisaba Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas .....	155
<i>Toto Sugito dan Chusmeru</i>	
Dialektika Demokrasi dan <i>Local Wisdom</i> : Ikhtiar Mewujudkan Etika Politik di Indonesia .....	169
<i>Andy Dermawan</i>	
Pembelajaran Baca Al Quran dengan Metode <i>Peer Teaching</i> di SMP Muhammadiyah I Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta .....	180
<i>Rahmad Santosa</i>	
Mitologi Banyumas dalam Upacara Adat Begalan .....	194
<i>Eni Nur Aeni, Lynda Susanna WAF dan Erna Wardani</i>	
Kelenteng Hok Tek Bio Pasar Wage Purwokerto sebagai Simbol Perpaduan Budaya China dan Lokal .....	206
<i>Dyah Tjaturrini</i>	
Perilaku Sehat Ibu Hamil antara Persepsi dan Budaya di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas .....	216
<i>Sotyania Wardhianna</i>	
Menakar Dekolonisasi oleh Kelompok Perempuan dalam Kerangka Formulasi <i>Civil Society New Left</i> : Sebuah Pandangan Alternatif .....	228
<i>Sofa Marwah</i>	

Hambatan Perkembangan .....	<i>Mohammad Yamin</i>
Program Bantuan Operasi SDN I Langgongsari Kecamatan .....	<i>Pawrtha Dharma, N Ali Rokhman dan Sla</i>
Desentralisasi Pendidikan: Manajemen Berbasis Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) di .....	<i>Simin</i>
Kinerja Pelayanan Pegawai B Kabupaten Banyumas .....	<i>Darmanto Sahat Satya</i>
Identifikasi Masalah Pember dalam Kegiatan Posyandu di Kabupaten Banyumas .....	<i>Fatmah Siti Djawahir, Muslihudin</i>
Pemahaman Pustakawan Per Prinsip-prinsip Pengolahan Ba .....	<i>Daryanto dan Kusneni H</i>
Televisi Indonesia, Mensejaht .....	<i>Mite Setiansah</i>
Media Informasi, Iklan, dan Ke .....	<i>Suksmadi S.</i>
Penggunaan Jejaring Sosial Face Desa Jatisaba Kecamatan Cilong .....	<i>Endang Dwi S</i>

- Littlejohn, Stephen W. 2002. *Theories of Human Communication*, USA. Clark Baxter,
- Luthan, Fred, 1997, *Organizational Behaviour*, New York. Macgrau-Hill Inc,
- Simmel, George. 1964, *Conflict & the Web of Group-Affiliations* (Translated by Kurt H. Wolff and Reinhard Bendix), London. A free Press Paperback Macmillan Publishing Co., INC.

## Dialektika Demokrasi Dan *Local Wisdom*: Ikhtiar Mewujudkan Etika Politik Di Indonesia

Andy Dermawan

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Abstrak

Tulisan ini membahas tentang dialektika demokrasi dan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai manifesto etika politik di Indonesia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berada di tangan orang banyak, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, paling tidak begitulah Lincoln berpendapat. Sistem demokrasi menegaskan bahwa rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Di samping itu, ada satu hal terlupakan, yakni kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan suku, ras dan agama. Fakta menunjukkan, bahwa upaya pengawalan demokrasi sudah dilakukan, tetapi sampai saat ini, rakyat belum sejahtera. Hal itu terjadi karena belum ada signifikansi antara demokrasi dan kearifan lokal, termasuk juga minusnya ikhtiar memanfaatkan secara optimal *local wisdom* ketika melahirkan demokrasi, contohnya dapat kita saksikan pada Pilkada-pilkada.

Di tengah kegalauan itu, penting kiranya mencari solusi baru sebagai bentuk ikhtiar bangsa ini keluar dari masalah multi dimensi. Salah satu bentuk ikhtiar itu adalah mengeksplorasi *local wisdom*, yakni mendayagunakan kekuatan *local wisdom* untuk menopang demokrasi agar sinergi antara kebutuhan negara di dalam menyantuni warganya dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan cita-citanya di mana mereka tinggal. Pasalnya, peningkatan kesejahteraan rakyat tentu tidak dapat dilepaskan dari "kearifan lokal" sebagai dasar nilai masyarakat di dalam membangun peradaban dan kebudayaan kemanusiaan universal. Sinergi demokrasi dan kearifan lokal, diharapkan mampu mewujudkan etika politik yang bermartabat dan memberi keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terwujudnya etika politik bermartabat diharapkan mampu menopang nilai-nilai pribadi bangsa ini sehingga menyejahterakan rakyat merupakan tugas utama setiap warga negara.

Kata Kunci: demokrasi, *local wisdom*, etika politik

## Pendahuluan

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berada di tangan orang banyak, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, setidaknya begitulah Lincoln berpendapat. Sistem demokrasi menegaskan bahwa rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Model pemerintahan penganut demokrasi bukanlah pemerintahan yang sentralistik *an sich* tetapi mengoptimalkan potensi-potensi daerahnya. Meski diakui tetap saja ada celah masalah atau kekurangan di sana-sini. Pasca bergulirnya reformasi tahun 1998, Indonesia mulai membangun dinamika pergerakan nasional dalam rangka mencita-citakan negara demokrasi berlandaskan salah satunya prinsip keadilan. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, itulah mengapa hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang untuk mencapainya. Di tengah perjalanan reformasi terlihat jelas *trial and error* tetapi langkah terus berlanjut dalam rangka menemukan pola demokrasi yang selama ini pernah hilang dari bumi Nusantara setelah berada dalam genggaman Orde Baru lebih kurang 32 tahun lamanya.

Kini bangsa ini sedang menghadapi masalah baru, yakni tidak signifikannya antara ikhtiar demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Hitungan angka menunjukkan lebih kurang 13 tahun sudah bangsa Indonesia melewati masa krisis terhitung saat Orde Baru tumbang di tahun 1998. Upaya menuju demokrasi terus berjalan namun kenyataannya tidak demikian dengan nasib rakyat. Mereka seolah menjadi bulan-bulanan sepanjang masa hingga tidak jelas kapan semua ini berakhir. Politik bukannya sebagai alat untuk membangun peradaban manusia agar lebih bernilai tetapi malah membuat nestapa bagi sesama.

Di tengah kegalauan itu, penting kiranya mencari solusi baru sebagai bentuk ikhtiar bangsa ini keluar dari masalah multi dimensi. Salah satu bentuk ikhtiar itu adalah mengeksplorasi “kearifan lokal” (*local wisdom*), yakni mendayagunakan kekuatan *local wisdom* untuk menopang demokrasi agar sinergi antara kebutuhan negara di dalam menyantuni warganya dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan cita-citanya di mana mereka tinggal. Demokrasi dan *local wisdom* penting dijadikan suatu format baru sebagai jalan alternatif memunculkan solusi bangsa ini keluar dari masalah multi dimensi,

salah satunya peningkatan kesejahteraan rakyat. Peralnya, peningkatan kesejahteraan rakyat tentu tidak dapat dilepaskan dari “kearifan lokal” sebagai dasar nilai masyarakat di dalam membangun peradaban dan kebudayaan kemanusiaan universal. Pertanyaan penting yang bisa diajukan di sini berkaitan dengan demokrasi dan *local wisdom* adalah, apa tujuan utama mensinergikan antara demokrasi dan *local wisdom*? Benarkah etika politik bermartabat yang lahir dari rahim “kearifan lokal” (*local wisdom*) dan merupakan *core values* atau nilai-nilai inti dalam masyarakat mampu menopang mental-mental bangsa untuk menyejahterakan rakyatnya? Itulah yang akan menjadi pijakan demokrasi yang berkembang di Indonesia, dan pijakan itu suatu saat nanti di harapkan menjadi “demokrasi khas Indonesia, bukan lagi berkiblat kepada bikinan bangsa Barat yang sudah barang tentu memiliki kultur dan struktur masyarakat yang berbeda dengan rakyat Indonesia yang lahir dari berbagai varian etnik, ras dan agama”.

Makalah ini memperbincangkan tentang dialektika demokrasi dan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai suatu ikhtiar guna mewujudkan etika politik yang bermartabat dan memberi keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terwujudnya etika politik bermartabat diharapkan mampu menopang nilai-nilai pribadi bangsa ini sehingga menyejahterakan rakyat merupakan tugas utama setiap warga negara.

## Kronologis Historis Demokrasi dan *Local Wisdom*

Secara umum, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah memenuhi tahapan-tahapan realistik sebagaimana problematika yang dihadapinya. Beberapa perodesasi dapat dijelaskan di sini. Pertama, pada masa penghujung akhir perang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan (1945-1950), rentang tahun ini Indonesia masih menghadapi agresi Belanda yang ingin kembali ke Ibu Pertiwi. Sudah barang tentu pelaksanaan demokrasi belum berjalan baik disebabkan oleh adanya gencatan senjata melawan penjajah. Pada awal kemerdekaan dan awal pemerintahan yang sah, dikeluarkannya beberapa maklumat sebagai tanda bahwa pemerintahan Indonesia menghargai sekaligus menjunjung tinggi “adat demokrasi”. Hal itu sebagaimana terlihat pada Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 tentang lembaga legislatif. Disusul kemudian Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik dan Maklumat tanggal 14

Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer.

Kedua, pada masa liberal (1950-1959), ditandai oleh parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mempunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS

1950 Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yakni bubarkan konstituante, kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS.<sup>1</sup> Ketiga, pada masa demokrasi Terpimpin (1959-1966), yakni pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ditandai dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI. Selanjutnya, penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, jaminan HAM lemah, sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers, kebijakan politik luar negeri yang memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.<sup>2</sup> Keempat, masa demokrasi Orde Baru (1966-1998), demokrasi-orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hussainur mencatat, awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

<sup>1</sup> Lihat <http://husainnur.wordpress.com/2011/04/04/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia/>, diunduh pada selasa, 29 Nopember 2011.

<sup>2</sup>Ibid.

rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, tumbuhnya KKN yang merajalela. Sebab-sebab jatuhnya Orde Baru: krisis ekonomi, krisis politik, TNI tidak bersedia menjadi alat kekuasaan, Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden, berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Terakhir, demokrasi Orde Reformasi (1998-sekarang). Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak

demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada

prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga

eksekutif, legislatif dan yudikatif. Perlu diketahui, bahwa demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya

lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi, Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum, Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN, Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Amendemen UUD 1945 sudah sampai amendemen I, II, III, IV. Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemilu umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Ibid. Bandingkan dengan <sup>3</sup> Asef Bayat. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. (Stanford: Stanford University Press, 2007), hlm. 11.

Menelaah tahapan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, dapatlah kita kritisi bahwa pada periodisasi pertama, kedua, dan ketiga masih berkuat pada proses penataan ketatanegaraan. Proses panjang itu dilakukan agar negara memantapkan diri dalam hal petunjuk pelaksanaan undang-undang yang jelas. Kemudian pada masa Orde baru, misi dan tindakan untuk menyejahterakan rakyat mulai tampak di beberapa kebijakan, meski hanya di awal pemerintahan dan pertengahan pemerintahan Orde Baru. Contohnya, peningkatan dan pengembangan swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian dan pembukaan lahan baru di Jawa dan sebagian luar Jawa. Menurut hemat saya, Orde Baru mampu mengawali suatu bentuk pemerintahan dengan baik tapi tak mampu mengakhiri dengan baik, karena berakhir tragis dan Indonesia harus membayar mahal soal itu. Kini kita telah memasuki era Reformasi yang ditandai oleh beberapa peningkatan dan kemajuan berarti khususnya dalam hal keterbukaan informasi dan pengembangan teknologi. Lantas, bagaimana soal kesejahteraan rakyat?

Menurut hemat saya, tahapan demokrasi yang telah mampu dilewati rakyat Indonesia dengan baik dan penuh dinamika tetapi belum juga melahirkan kesejahteraan rakyat, itu diakibatkan oleh terputusnya mata rantai pengawalan demokrasi tapi meninggalkan *local wisdom* (kearifan lokal) yang mestinya menjadi salah satu pijakan ideologi, sosial, budaya dan politik bangsa Indonesia. Alasan saya sederhana, karena Indonesia merupakan negeri yang lahir dari bermacam-macam suku, etnis, ras dan agama. Jumlahnya tidak main-main, yakni ribuan, dari Sabang sampai Merauke. Perjuangan melahirkan demokrasi di Indonesia seakan melupakan bahwa *local wisdom* “seolah-olah” bukan bagian dari penegakan dan perjuangan demokrasi di Negeri ini. Itulah mengapa nestapa kemanusiaan yang berulang kali terjadi senantiasa muncul pada setiap pelaksanaan Pilkada apapun bentuknya.

Kearifan lokal (*local wisdom*) senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga nilai-nilai yang lahir dari adat istiadat, keyakinan (agama), dan undang-undang itu menjadi *structure fundamental* suatu bangsa. Itulah mengapa di Sumatra Barat, tradisi demokrasi begitu dimaknai mendalam, yakni *adat bersendi syara'*, dan *syara' bersendi adat*, di mana antara nilai-nilai lokal memiliki kaitan dengan pola pengembangan demokrasi dalam penerapannya di masyarakat.

### Etika Politik Bermartabat: Ikhtiar Mencari Demokrasi Khas Indonesia

Etika politik bertujuan, sebagaimana dikatakan Ricoeur, untuk mengarahkan ke kehidupan yang baik, bersama dan untuk orang lain, dan dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, penting kiranya sejenak memahami kembali manfaat dan tujuan diberikannya akal oleh Allah Swt kepada manusia. Menurut argumentasi Nur Ichwan bahwa akal (*aqal*) adalah potensi yang diberikan Allah untuk semua manusia untuk dapat memahami baik dan buruk, benar dan salah serta mengembangkan peradaban (*isti' mar*) di muka bumi, agar manusia dapat memenuhi fungsi keberadaannya sebagai *khalifatullah* (wakil Allah).<sup>5</sup> Allah pun telah menganugerahkan *qalb* (hati) yang melaluinya hendaknya akal berfungsi.<sup>6</sup> Perpaduan antara akal dan *qalb* ini membentuk *fitrah* yang *built-in* dalam setiap diri manusia untuk mengetahui kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan.<sup>7</sup>

Nur Ichwan menegaskan, bahwa kekhilafahan tidak diberikan kepada malaikat, kendatipun mereka adalah makhluk yang paling taat kepada-Nya. Memang akal memerlukan bimbingan spiritual wahyu, dan itulah fungsi mengapa agama ada. Wahyu mengabarkan kebaikan dan keburukan yang berada di luar jangkauan akal. Dalam hal yang dapat dijangkau akal, wahyu mengafirmasinya, kecuali dalam hal yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip tauhid. Menurut catatan Musa Asy'arie sebagaimana dikutip Nur Ichwan, menjelaskan bahwa hubungan akal dan wahyu hendaklah tidak dipahami secara struktural, hubungan atas-bawah, namun secara *dialektik-fungsional*. Pemahaman semacam ini, menurutnya, dapat mendorong dan menggerakkan dinamika kebudayaan ke arah yang transenden. Proses ini akan membawa manusia ke arah spiritualitas baru yang mencerahkan dan kehidupan beragama menjadi medan pengayaan spiritualitas terus-menerus untuk menjadi rahmat dan

<sup>4</sup> Lihat Haryatmoko, “Etika Politik dan Kekuasaan”, dalam *Kompas*, Jakarta, 2003.

<sup>5</sup> Andy Dermawan menerjemahkan *khalifatullah* dengan “mandataris Allah”. Lihat Andy Dermawan, *Dialektika Islam dan Multikulturalisme di Indonesia: Ikhtiar Mengurai Akar Konflik*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009), hlm. 25.

<sup>6</sup> QS al-Hajj 22: 46. “Mereka mempunyai hati, yang melaluinya mereka menggunakan akalnya.”

<sup>7</sup> QS al-Rum 30:30. “Fitrah Allah, yang di atas fitrah itu manusia diciptakan.”

kedamaian bagi kehidupan bersama dan beresama.<sup>8</sup> Wahyu di sini dipahami bukan pada level legal-formal, namun pada level etika dan spiritual.<sup>9</sup>

Kembali kepada persoalan di atas, pemanfaatan *local wisdom* dalam konteks demokrasi di tanah air sesungguhnya memberikan peluang emas bagi ditemukannya demokrasi khas Indonesia. Ini penting diikhtari. Pasalnya, hingga saat ini demokrasi “pinjaman” ala Barat cukup merepotkan jika diterapkan di tanah air, seperti prinsip kebenaran diukur dari pendapat mayoritas, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Paling tidak, ada beberapa nilai yang lahir dari kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan guna mewujudkan model pemerintahan yang baik dan penuh berkah bagi masyarakat.

Nusantara adalah taman dunia. Ini merujuk pada keanekaragaman Indonesia yang bukan saja terdiri dari sekitar 17.500 pulau yang dihubungkan oleh lautan tetapi juga kekayaan etnis, budaya, dan agama –ibarat keindahan aneka bunga dalam sebuah taman. Tetapi, taman tersebut tentu saja bukan berada dalam ruang yang vakum. Dia berada dalam gerak kehidupan yang dinamis sehingga bergulat dalam kepentingan lokal, nasional, dan global. Sehubungan dengan hal tersebut, pelestarian nilai-nilai budaya daerah, dengan upaya mencari, menggali, dan mengkaji serta mengaktualisasikan kearifan lokal merupakan modal dasar baru yang dapat digunakan untuk memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kenyataan menunjukkan, kebudayaan lokal yang terbengkalai akhirnya bagaikan “sehelai pakaian kusut di gantungan”. Oleh karena itu, agar tidak kusut, solidaritas sosial budaya yang saling menghargai sesama warga bangsa perlu diaktualisasikan kembali.<sup>11</sup>

Penting diingat, bahwa aktualisasi solidaritas sosial budaya bangsa tersebut dalam penerapannya tentu saja tidak menggunakan pendekatan yang dipolakan memusat (sentralistik). Hal itu disebabkan pendekatan sentralistik secara alamiah mengandung kerentanan luar biasa

<sup>8</sup> Musa Asy'arie, *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 20.

<sup>9</sup> Bandingkan dengan Seri Buku TEMPO Natsir, *Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim*, (Jakarta: Tempo, 2011).

<sup>10</sup> Bandingkan dengan David C. Legee dan Lyman A. Kellstedt, *Agama dalam Politik Amerika*, (Jakarta: Yayasan obor dan Freedom Institute, 2006).

<sup>11</sup> Lihat Sultan Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 21-23.

terhadap perubahan terutama jika perubahan itu terjadi secara mendadak. Sebaliknya, pendekatan nonsentralistik membuat masyarakat lentur. Mereka selalu siap, tidak mudah kaget dan bingung jika berhadapan dengan suatu krisis, apapun krisis itu (ekonomi, politik atau keamanan). Sentralistik kebudayaan bukan saja berdampak pada timbulnya berbagai kesenjangan, tetapi juga meminggirkan peran kantung-kantung kebudayaan di daerah. Seharusnya, setiap daerah justru diberi peran untuk menjadi “pusat-pusat kebudayaan”. Nilai-nilai budaya yang ada harus dilihat sebagai bagian dari masa depan Republik dan dikembangkan secara kreatif. Sebab jika tidak, selain terus-menerus dipinggirkan, kantung-kantung kebudayaan itu akan berubah menjadi defensif dan konservatif. Melalui otonomi budaya, tergalilah nilai-nilai kearifan lokal-tradisional (*local wisdom*), dan jika direvitalisasi dan diadaptasi dalam masyarakat modern, bisa menjawab tantangan zaman. Bukankah proses pembentukan kebudayaan Indonesia sendiri sesungguhnya berlangsung tidak melalui proses yang sentralistik. Sebagai bangsa, Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnis, dan berada dalam keragaman budaya. Kemajemukan inilah yang kemudian membentuk suatu kebudayaan bernama Indonesia.<sup>12</sup>

Menarik “benang merah” pemaparan di atas, semakin jelas bahwa *display* dan pemanfaatan nilai-nilai lokal sudah mendesak dan saatnya semua anak bangsa beikhtiar memformulakan demokrasi Indonesia yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Rakyat Indonesia memiliki kultur dan struktur yang jauh berbeda dengan rakyat atau penduduk bumi di belahan lainnya. Karakter itu menguat seiring dengan proses pemahaman dan kesediaan diri menerima segala perbedaan yang ada guna menjaga harmoni. Dari penjelasan ini terjawab, bahwa krisis politik, kekerasan yang makan korban jiwa manusia dan kerusakan fisik atau infrastruktur publik akibat Pilkada, jelas karena pengetrapan sistem demokrasi yang tak ramah bagi bangsa ini, tak familier atau tak dikenali oleh segenap anak bangsa yang sedang belajar demokrasi. Jadi, bukan demokrasinya yang dilarang atau disayangkan tetapi pengetrapan demokrasi ala Barat itulah yang mesti menjadi pertimbangan utamanya.

<sup>12</sup> *Ibid.* Bandingkan dengan Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), khusus bagian “Teori Sistem dan Teori Negara serta Bab VI tentang Teori-teori Budaya Politik: Kolektifitas dan Manusia Baru”.

Setelah penggalian dan *display* nilai-nilai lokal itu dimengerti oleh seluruh anak bangsa yang belajar demokrasi, maka otomatis pengetrapan sistem, pola dan cara berdemokrasi akan cenderung menjadikan tata nilai (red. *local wisdom*) tersebut menjadi *structure fundamental* bagi bangunan politik di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengemis bahkan “mengompas” para calon pejabat dalam setiap pemilihan di Pilkada atau Pusat oleh karena iming-iming uang atau fasilitas lain yang ditawarkannya, tetapi terbangun suatu kesadaran yang memastikan bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak sudah menjadi dasar nilai penduduk negeri Nusantara yang telah terdidik berbeda dan memahami setiap perbedaan yang ada. Bersatu dalam perbedaan merupakan nilai inti yang dimiliki bangsa ini. Dari sini pula, perbedaan dalam setiap pandangan politik merupakan hal biasa terjadi. Sikap dan cara pandang bangsa menjadi ciri utama di dalam menyikapi setiap masalah yang muncul oleh akibat gesekan-gesekan politik. Jika ini diikhtiri bersama, bangsa Indonesia tak perlu lama lagi menunggu rakyatnya berteriak lantang: “...mana kesejahteraan dan hak-hak kami!!”.

#### Penutup

Masalah telah diurai, dan berbagai pandangan telah dijelaskan. Tinggal bagaimana kita sebagai putra bangsa Indonesia bersikap dan memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Demokrasi adalah hal yang mutlak dalam hidup bernegara. Tetapi bagaimana formula demokrasi itu dijelaskan dan dijalani, itulah yang menjadi masalah selama ini. Demokrasi mestinya lahir dari rahim nilai-nilai lokal sebagai *local wisdom* atau suatu kearifan yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah mengakar ratusan tahun lamanya. Cara berfikir instan, dan cara bertindak spontan di dalam menyikapi perbedaan mesti segera dikoreksi dan dilakukan instropeksi agar dikemudian hari tidak menjadi masalah politik yang pada akhirnya rakyatlah yang dirugikan. Segera melakukan penggalian nilai-nilai lokal dan memanfaatkannya disetiap kancah perpolitikan di negeri ini. Agar keberkahan, kebersamaan dapat terwujud, karena masyarakat Indonesia telah memiliki konsep etika politik tersendiri yang lahir dari nilai-nilai kearifan lokal. Semoga.

#### Daftar Pustaka

- Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*, Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Haryatmoko, “Etika Politik dan Kekuasaan”, dalam *Kompas*, Jakarta, 2003.
- Musa Asy'arie, *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma*, terj. Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sultan Hamengkubuwono X, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Seri Buku TEMPO Natsir, *Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim*, Jakarta: Tempo, 2011.
- <http://husainnur.wordpress.com/2011/04/04/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia/>, diunduh pada Selasa, 29 Nopember 2011.